

**PELAKSANAAN PERTEMUAN PENINGKATAN
KEMAMPUAN KELUARGA (P2K2) PENERIMA
MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI
KELURAHAN SEMPAJA UTARA KECAMATAN
SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA**

Pina Oktaviani, Fajar Apriani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 11, Nomor 1, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda

Pengarang : Pina Oktaviani

NIM : 1502015070

Program : S1 Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 6 Februari 2023
Pembimbing,



Dr. Fajar Apriani, M.Si
NIP. 19830414 200501 2 003

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL S1 ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Prodi S1 Administrasi Publik  Dr. Fajar Apriani, M.Si NIP. 19830414 200501 2 003
Volume	: 11	
Nomor	: 1	
Tahun	: 2023	
Halaman	: 58 - 71	

PELAKSANAAN PERTEMUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA (P2K2) PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN SEMPAJA UTARA KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA

Pina Oktaviani ¹, Fajar Apriani ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda serta untuk mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian berdasarkan komponen pelaksanaan P2K2 yaitu tempat pelaksanaan, pendamping, waktu pelaksanaan, alat pembelajaran, peserta dan modul serta faktor penghambat. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan ketua dan koordinator PKH Kota Samarinda. Informan lainnya pendamping PKH, sekretaris lurah, kepala seksi kesejahteraan sosial dan KPM PKH Kelurahan Sempaja Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan P2K2 penerima manfaat PKH di Kelurahan Sempaja Utara dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal, akan tetapi pendamping telah menjadikan para keluarga penerima manfaat mulai sadar untuk berdaya mandiri dalam kehidupannya. Mereka mulai menerapkan apa yang telah mereka pelajari bersama pendamping dalam mendidik dan mengasuh anak, melindungi anak, sadar akan kesehatan dan pemenuhan gizi, mengelola keuangan dan memulai usaha. Hasil akhir dari pemberdayaan ini sudah sampai pada tahap graduasi mandiri, sudah ada KPM yang tergraduasi secara mandiri di Kelurahan Sempaja Utara. Faktor penghambat dalam pelaksanaan P2K2 antara lain, kurangnya sumber daya manusia pendamping PKH, kurangnya dana pertemuan yang diberikan pemerintah, pendataan yang masih kurang baik dan kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam memaksimalkan pembelajaran pelaksanaan pertemuan kelompok P2K2.

Kata Kunci : *Pemberdayaan Keluarga, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga(P2K2), Program Keluarga Harapan (PKH)*

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: pinaoktaviani44@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan, pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan sebuah Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH. Program ini memberikan bantuan uang non tunai bersyarat sebagai jaminan sosial untuk mengakses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang mencakup kesehatan balita, ibu hamil dan pendidikan bagi anak usia pendidikan dasar hingga sekolah menengah atas serta pemenuhan gizi bagi lanjut usia dan perawatan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan sejak tahun 2007.

Dalam pelaksanaan PKH, terdapat juga kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang dikenal dengan istilah *Family Development Session* (FDS) yaitu P2K2 atau sekolah PKH adalah usaha untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan keluarga dalam menjalani kehidupannya melalui proses belajar yang diharapkan dapat merubah perilaku dan pola pikir KPM, dalam rangka perubahan perilaku keluarga penerima manfaat, diperlukan edukasi berkelanjutan yang dapat memberikan pemahaman kepada KPM tentang pentingnya pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan keluarga, perlindungan anak dan pengasuhan lanjut usia dan disabilitas.

Salah satu provinsi yang melaksanakan PKH yaitu Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan PKH sejak tahun 2012 hingga saat ini. Jumlah penerima bantuan di Kota Samarinda per tahun 2019 di Kota Samarinda sebanyak 13.668 KPM PKH yang tersebar di 10 Kecamatan yang ada di Kota Samarinda sebagaimana tampak pada sajian data di tabel berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kota Samarinda Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah KPM
1.	Loa Janan Ilir	734
2.	Palaran	1.728
3.	Samarinda Ilir	1.572
4.	Samarinda Kota	482
5.	Samarinda Seberang	1.142
6.	Samarinda Ulu	1.780
7.	Samarinda Utara	2.611
8.	Sambutan	1.024
9.	Sungai Kunjang	1.126
10.	Sungai Pinang	1.469
Total KPM		13.668

Sumber: Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kota Samarinda Tahun 2019

Berdasarkan tabel data tersebut Kecamatan Samarinda Utara adalah sebagai Kecamatan yang terdapat paling banyak masyarakatnya yang mendapat bantuan PKH yaitu sebanyak 2.611 KPM. Dari pemaparan Koordinator PKH Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda pada wawancara awal yang penulis lakukan diketahui bahwa Kecamatan Samarinda Utara melaksanakan PKH mulai dari tahun 2012 dan pelaksanaan pertemuan kelompok P2K2 juga sudah dimulai pada tahun yang sama dengan pegangan modul yang jika telah selesai semua sesi akan diulang-ulang sampai KPM paham.

Penerima PKH di Kecamatan Samarinda Utara tersebar di delapan Kelurahan dengan total 80 kelompok peserta PKH. Masing-masing kelompok terdiri dari 30 peserta. Secara teknis, PKH di Kecamatan Samarinda Utara dikelola oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) tingkat Kecamatan dengan sumber daya delapan orang pendamping untuk mendampingi 2.611 KPM.

Tabel 2. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2019

No.	Kelurahan	Jumlah KPM
1.	Budaya Pampang	63
2.	Sungai Siring	194
3.	Tanah Merah	297
4.	Lempake	653
5.	Sempaja Barat	50
6.	Sempaja Timur	184
7.	Sempaja Utara	874
8.	Sempaja Selatan	269
Jumlah KPM		2.611

Sumber : Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kota Samarinda Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas Kelurahan Sempaja Utara adalah Kelurahan yang terdapat paling banyak KPM di antara kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Samarinda Utara yaitu sebanyak 874 KPM PKH. Penelitian ini mengambil fokus di Kelurahan Sempaja Utara yang KPM peserta PKH paling banyak yaitu dengan 28 kelompok KPM dan dengan didampingi oleh tiga orang pendamping.

Dari hasil observasi melihat dari fenomena di lapangan, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya yaitu: pertama, adanya pertemuan kelompok yang tidak sesuai dengan yang seharusnya setiap pertemuan satu kelompok tidak lebih dari 40 orang penerima manfaat menurut Pedoman P2K2 (2018:4). Akan tetapi faktanya di lapangan ada beberapa kelompok yang digabung dijadikan dalam satu pertemuan sehingga sampai terdiri dari 50-70 KPM dalam satu kali pertemuan. Kedua, tidak semua kelompok yang ada rutin dalam melaksanakan P2K2 setiap bulannya, yang seharusnya semua kelompok melaksanakan pertemuan wajib satu bulan sekali menurut Pedoman P2K2 (2018:3) fakta di lapangan pendamping wilayah batu cermin dan bayur dari 14 kelompok yang melaksanakan pertemuan hanya 8 sampai 10 kelompok setiap

bulannya. Ketiga, adanya KPM yang tidak mengikuti kegiatan pertemuan Kelompok P2K2 dengan berbagai alasan, dan terkadang mereka menitip absen, dalam pedoman PKH (2019:27-28) salah satu kewajiban penerima manfaat ialah mengikuti pertemuan kelompok setiap bulannya serta tidak semua KPM mempunyai buku pintar pegangan peserta P2K2. Keempat, alat dan bahan ajar yang digunakan dalam kegiatan P2K2 belum semua dijalankan seperti dengan memakai Poster, brosur, proyektor, dan *speaker* menurut Pedoman P2K2 (2018:14). Pendamping lebih banyak menggunakan *Flipchart* dalam penyampaian materi. KPM banyak yang tidak mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh pendamping dikarenakan tidak memakai alat pengeras suara yang mengakibatkan banyak dari KPM yang mengobrol sendiri serta tidak fokus dalam mengikuti pertemuan kelompok.

Melihat dari permasalahan yang diatas, terdapat rumusan masalah yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Pertama peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Kedua, peneliti ingin mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Pelaksanaan Kebijakan Publik

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (Pasolong, 2017:46-47) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya menurut Dunn (Pasolong, 2017:47) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Menurut Edwards III (Wahyudi, 2016:105), pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*). Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya.

Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan dan ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan mengacu pada mekanisme, sumberdaya, dan hubungan terkait dengan pelaksanaan program kebijakan (Mthethwa, 2012:36). Tanpa pelaksanaannya, kebijakan yang telah ditetapkan akan sia-sia. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang esensial dalam kebijakan publik.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Parsons dalam Anwas (2013:49) pemberdayaan adalah menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Selanjutnya menurut Ife dalam Anwas (2013:49) pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan Soebiato (2015:30). Kemudian menurut Rasyad (2014:64) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri mampu mengelola dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri serta mampu mengatasi tantangan atau persoalan di masa yang akan datang.

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Dilaksanakan oleh pendamping sosial dengan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan setiap 1 (satu) bulan sekali. (Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 50:27).

Tujuan dari Family Development Session (FDS) atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam (Pedoman PKH, 2019:44-45) yaitu: Secara umum tujuan dalam pertemuan kelompok P2K2 adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial dalam lingkup keluarga, sehingga mendorong terciptanya percepatan perubahan perilaku.

Tujuan khusus dan fungsi Pertemuan Peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku KPM terhadap kesehatan dan gizi bagi ibu hamil, menyusui, bayi dan balita.
2. Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku KPM untuk perbaikan kualitas pengasuhan dan pendidikan anak.

3. Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku KPM dalam pengelolaan keuangan keluarga, meningkatkan literasi keuangan, pemanfaatan layanan bank, dan strategi membuka usaha bagi KPM.
4. Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku KPM terhadap pencegahan kekerasan dan penelantaran pada anak.
5. Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku KPM dalam dukungan keluarga terhadap kesejahteraan lansia dan perawatan disabilitas berat.
6. Meningkatkan kualitas pertemuan bulanan yang diselenggarakan oleh pendamping (Pedoman P2K2, 2018:3).

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan batasan konsep yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitian. Definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) pada Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu suatu pelaksanaan P2K2 dalam rangka pemberdayaan penerima manfaat PKH. Pelaksanaan yang dimaksud yaitu terdiri dari komponen-komponen dalam pelaksanaan P2K2 yang berdasarkan pada tempat pelaksanaan, pendamping PKH, waktu pelaksanaan, alat pembelajaran, peserta, dan modul P2K2. Dimana dalam hal ini dilaksanakan oleh pendamping sebagaimana tugas dan fungsinya. Serta, hak dan kewajiban bagi peserta PKH sebagai penerima manfaat bantuan sosial dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan melalui P2K2 PKH.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun fokus dari penelitian adalah berdasarkan dengan komponen pelaksanaan P2K2 yaitu tempat pelaksanaan, pendamping PKH pelaksana, waktu pelaksanaan, alat pembelajaran, peserta dan modul P2K2 serta faktor penghambat. Sumber dan jenis data penelitian menggunakan pemilihan informan melalui metode *Purposive Sampling* dengan sumber data primer *key Informant* ketua dan koordinator pelaksana PKH Kota Samarinda, Informan lainnya para pendamping PKH, sekretaris lurah, kepala seksi kesejahteraan sosial, dan KPM PKH Kelurahan Sempaja Utara dan sumber data sekunder yaitu catatan lapangan, laporan-laporan dan foto dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis model interaktif yang dikembangkan oleh (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sempaja Utara

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang dikenal dengan *Family Development Session* (FDS) merupakan sebuah intervensi

perubahan perilaku yang terstruktur. P2K2 diberikan pada semua KPM PKH sejak tahun pertama kepesertaan. Materi Pertemuan P2K2 wajib disampaikan melalui pertemuan kelompok setiap bulan yang disampaikan oleh Pendamping Sosial PKH terhadap kelompok-kelompok dampungannya dan menjadi salah satu bentuk verifikasi komitmen bagi KPM PKH. Tujuan utama P2K2 penerima manfaat PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin dalam Kegiatan P2K2 penerima manfaat PKH yang diharapkan dapat memberdayakan KPM dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan dan gizi, pengelolaan keuangan, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial bagi lansia dan disabilitas sehingga dalam program ini pada akhirnya akan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Berikut adalah tabel jumlah KPM di Kelurahan Sempaja Utara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 3. Jumlah KPM Penerima PKH di Kelurahan Sempaja Utara Tahun 2018-2022.

No	Tahun	Jumlah KPM
1.	2018	866
2.	2019	874
3.	2020	811
4.	2021	753
5.	2022	735

Sumber: PPKH Kota Samarinda 2022

Kelurahan Sempaja Utara menerima PKH sejak tahun 2012, Berdasarkan data yang diperoleh di atas diketahui bahwa pada tahun 2018 ke 2019 terjadi penambahan jumlah KPM, dan di tahun 2021 ke 2022 terdapat penurunan jumlah KPM PKH. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 masyarakat penerima bantuan sosial PKH berkurang sebanyak 139 KPM yang telah tergraduasi secara alamiah dan secara mandiri. KPM di Kelurahan Sempaja Utara sebanyak 735 di tahun 2022 penerima PKH dan mempunyai 3 orang pendamping sosial PKH, dengan uraian wilayah pendampingan yaitu : Ibu Nanda Suci Rahimah mendampingi wilayah (padat karya dan pinang seribu) dengan mendampingi 163 KPM yang terbagi menjadi 10 kelompok, dengan kemudian Bapak Ahmad Ramdani mendampingi wilayah (batu cermin dan bayur) dengan mendampingi 369 KPM yang terbagi menjadi 14 kelompok, serta Bapak Agus Dwi Kurniawan mendampingi wilayah (batu besaung dan berambai) dengan mendampingi 203 KPM yang terbagi menjadi 12 kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Pelaksanaan P2K2 di Kota Samarinda khususnya di Kelurahan Sempaja Utara telah berjalan dari tahun 2012 hingga sekarang tahun 2022 dan telah menjadikan penerima manfaat bisa dikatakan sudah adanya perubahan pola pikir dan peningkatan keterampilan yang terjadi pada peserta KPM PKH dan sudah mulai dalam proses sadar untuk berdaya dan berusaha mandiri dalam mengubah kehidupannya dari yang kurang menjadi lebih berdaya mandiri. Hal tersebut didukung oleh teori tahapan-tahapan pemberdayaan menurut Sulistyani (2004:83) yang terdiri dari:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku
Tim pelaksana telah menyiapkan fasilitas dan menciptakan pra-kondisi untuk keberlangsungan proses pemberdayaan KPM yang efektif yaitu dengan sumber daya manusia pendamping yang telah melaksanakan diklat dan tersertifikasi, serta dengan menggunakan modul, alat peraga bagi pendamping, dan buku pintar yang diperuntukan untuk KPM. Pendamping melakukan penyentuhan kesadaran yang dapat membuka keinginan dan kesadaran penerima manfaat tentang kondisi mereka sehingga KPM berperilaku sadar dan peduli, mereka merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan
KPM menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang berupa pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan dan gizi, perlindungan anak, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Mereka sudah memulai menerapkan materi-materi yang disampaikan oleh pendamping dan narasumber lainnya ketua PKK serta kader posyandu dalam pertemuan P2K2. Seperti mendampingi anak saat belajar, memasukan anak ke sekolah PAUD, mendaftarkan anak ke Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), mengikuti kegiatan posyandu dan lainnya
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan
Pada tahap ini sebagian besar para peserta penerima manfaat telah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari secara langsung, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif yang mengantarkan para KPM pada kemandirian. Seperti memulai membuka usaha kecil-kecilan.

Dalam hal ini juga didukung oleh data Graduasi PKH dimana data ini adalah salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan kegiatan P2K2. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 pasal 56 menjelaskan bahwa graduasi terdiri atas graduasi alamiah dan graduasi hasil pemukhtahiran sosial ekonomi. Graduasi alamiah merupakan berakhirnya masa kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan. Graduasi mandiri adalah hasil pemukhtahiran sosial ekonomi yang merupakan berakhirnya masa kepesertaan PKH berdasarkan hasil pemukhtahiran sosial ekonomi.

Berikut data yang peneliti peroleh dari ketiga pendamping, graduasi peserta PKH di Kelurahan Sempaja Utara bulan Januari 2022 sampai Juli 2022 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. Data Graduasi Peserta PKH di Kelurahan Sempaja Utara Periode Januari sampai Juni 2022.

No	Wilayah Dampungan	Graduasi Alamiah	Graduasi Mandiri
1.	Batu Cermin dan Bayur	22 KPM	2 KPM
2.	Padat Karya dan Pinang seribu	30 KPM	15 KPM
3.	Batu Besaung dan Berambai	10 KPM	3 KPM
Jumlah		62 KPM	20 KPM

Sumber : Data laporan pendamping PKH Kelurahan Sempaja Utara tahun 2022

Dari tabel di atas dari 20 KPM graduasi mandiri yang mempunyai usaha sebanyak 5 KPM yaitu usaha warung empek-empek, penjual sayur di pasar, warung sembako, penjual kue, yang lainnya dalam graduasi mandiri terindikasi mampu seperti, suaminya sudah kerja mapan, mempunyai barang dan kendaraan mewah. Dengan demikian KPM penerima bantuan sosial PKH di Kelurahan Sempaja Utara dalam pemberdayaan penerima manfaat mulai menerapkan ilmu yang telah mereka dapatkan dalam mengasuh dan mendidik anak, kesehatan dan pemenuhan gizi, melindungi anak, mengelola keuangan dan merencanakan usaha. Hal ini juga sesuai dengan tujuan khusus dan fungsi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

Tempat Pelaksanaan P2K2

Tempat pelaksanaan kegiatan P2K2 PKH menurut buku petunjuk pelaksanaan P2K2 (2018:3) P2K2 dilaksanakan di lokasi yang dapat mendukung terlaksananya P2K2 dengan baik dengan kriteria sebagai berikut: yaitu dapat dijangkau dengan mudah oleh peserta, memadai untuk menampung semua peserta, memadai untuk menyajikan dan menampilkan materi pembelajaran, tidak berlokasi didekat keramaian yang mengganggu pertemuan seperti (jalan, pasar, sekolah), diselenggarakan di waktu yang disepakati oleh peserta dan pendamping, P2K2 dapat dilaksanakan ditempat fasilitas umum seperti ruang pertemuan aula kelurahan, rumah peserta, mushola dan lainnya.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan tempat pelaksanaan P2K2 penerima manfaat PKH di Kelurahan Sempaja Utara telah berjalan sesuai dengan pedoman pelaksana P2K2 yaitu di rumah KPM peserta PKH ataupun di Mushola yang dapat menampung semua peserta dan jauh dari keramaian, sehingga pendamping dan KPM dapat leluasa untuk melaksanakan pertemuan kelompok dengan baik dan tenang. hanya saja ada beberapa kelompok yang saat pertemuan P2K2 digabung dalam satu pertemuan yang mengakibatkan kelebihan peserta sehingga tempat yang seharusnya muat untuk pertemuan satu kelompok menjadi sempit dan sesak yang menjadikan peserta tidak semua bisa fokus dengan materi yang disampaikan oleh pendamping.

Pendamping PKH Pelaksana P2K2

Pendamping sosial PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut, dikontrak kerjakan, dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan ditingkat Kecamatan. (Pedoman PKH 2019:44). Dalam buku petunjuk pelaksana P2K2 PKH (2018:3) bahwasanya pendamping yang boleh

melaksanakan P2K2 harus sudah mengikuti salah satu kegiatan pembekalan berupa: Diklat P2K2 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat dan atau kegiatan *Coaching* yang dibimbing oleh korwil/korkab/pendamping senior yang telah mengikuti diklat P2K2 yang diselenggarakan oleh balai diklat.

Semua pendamping yang bertugas di Kelurahan Sempaja Utara telah mengikuti dan menyelesaikan diklat P2K2 yang dilaksanakan pada tahun 2012 dan 2019 yang dilaksanakan secara bertahap yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial berlokasi di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin selama 10 hari dan telah mendapatkan sertifikat diklat P2K2 sehingga pendamping PKH menjadi tenaga kesejahteraan sosial tersertifikasi. Para pendamping di Kelurahan Sempaja Utara telah mendapatkan Sertifikat Diklat P2K2 untuk memenuhi syarat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan P2K2 peserta PKH yang dilaksanakan satu bulan sekali pada peserta KPM PKH dampingan pendamping masing-masing. Dalam hal ini pendamping PKH menjadi tenaga kesejahteraan sosial tersertifikasi.

Waktu Pelaksanaan P2K2

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan P2K2 PKH (2018:3) mengenai waktu pelaksanaan pertemuan kelompok yaitu pertemuan P2K2 diselenggarakan satu kali dalam sebulan, satu sesi disampaikan dalam satu kali pertemuan, penyampaian sesi P2K2 berlangsung sesuai panduan dalam modul (120) menit, dan jam penyelenggaraan P2K2 dapat ditentukan sesuai kesepakatan antara peserta PKH dan pendamping.

Sesuai dengan buku panduan P2K2 waktu pelaksanaan P2K2 peserta PKH di Kelurahan Sempaja Utara, penulis mengetahui bahwa pendamping dan KPM saling bekerjasama dalam menentukan waktu pertemuan kelompok, pendamping dan KPM juga mempunyai grup *WhatsApp* yang salah satu fungsinya untuk memudahkan mereka dalam menentukan waktu pelaksanaan kegiatan P2K2, sehingga pendamping tidak perlu datang terlebih dahulu ke KPM untuk menentukan waktu secara langsung agar lebih hemat waktu, tenaga dan dana. Biasanya pertemuan dilaksanakan pada hari sabtu, minggu pagi atau sore selama 2 jam pertemuan. Namun masih ada saja KPM yang tidak hadir mengikuti pertemuan kelompok P2K2 dan titip absen.

Alat Pembelajaran P2K2

Dalam buku petunjuk pelaksanaan P2K2 PKH tahun (2018:4) peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan P2K2 adalah: buku pintar bagi KPM, Modul bagi pendamping, Brosur, Poster, *Flipchart*, Film dan Kartu. Kemudian peralatan Audio Visual sebagai pendukung yang dapat digunakan (tidak wajib) berupa Laptop, Speaker, TV, DVD Player, dan Alat tulis.

Berdasarkan pedoman dan wawancara, pengamatan penulis saat ikut dalam pertemuan kelompok P2K2 di Kelurahan Sempaja Utara diketahui bahwa masing-masing pendamping belum menggunakan semua alat peraga seperti poster dan brosur. Pendamping menggunakan alat peraga modul *Flipchart*, kartu yang

diberikan oleh Kementerian Sosial dalam menjalankan kegiatan P2K2 di Kelurahan Sempaja Utara, dan alat pendukung lain untuk memaksimalkan penyampaian materi seperti laptop untuk menampilkan video saat penyampaian materi tidak semua pendamping mempunyai laptop jadi tidak semua KPM dampingan dapat menonton materi video yang ada, selain itu proyektor karena berkenaan dengan penyampaian materi melalui video, tidak memiliki proyektor membuat ruang dalam pemutaran video menjadi terbatas dan membuat beberapa KPM kesulitan dalam menerima materi yang diberikan.

Peserta Pertemuan P2K2

Berdasarkan buku petunjuk pelaksanaan P2K2 PKH (2018:4) peserta penerima manfaat pelaksanaan P2K2 yaitu : peserta P2K2 adalah seluruh peserta PKH yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Kemudian untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, jumlah peserta yang menghadiri P2K2 tidak lebih dari 40 orang dalam satu pertemuan.

Peserta P2K2 di Kelurahan Sempaja Utara pembagian kelompok telah sesuai dengan pedoman P2K2 yakni semua peserta anggota PKH yang disebut dengan KPM di mana rata-rata semua peserta yang mengikuti kegiatan P2K2 adalah ibu-ibu KPM dan pembagian perkelompok P2K2 yaitu 15 sampai 30 KPM, namun ada juga pendamping yang dalam pertemuan menggabungkan beberapa kelompok 3 sampai 4 kelompok dalam sekali pertemuan serta ada beberapa KPM yang masih belum sadar akan pentingnya pertemuan kelompok, jadi biasanya mereka menitip absen kepada KPM yang berangkat dalam pertemuan kelompok walaupun tidak banyak tetapi ada, adanya penggabungan dari beberapa kelompok dalam sekali pertemuan yang mengakibatkan tempat menjadi full dan sesak serta adanya beberapa anak kecil yang ikut hadir dalam pertemuan P2K2 yang mengakibatkan kurang fokusnya peserta dalam mengikuti kegiatan pelaksanaan P2K2, walapun begitu hal itu tidak begitu berpengaruh besar dalam pelaksanaan P2K2 di Kelurahan Sempaja Utara, semangat KPM dalam mengikuti kegiatan pertemuan kelompok sangat besar mereka sangat antusias mengikuti kegiatan dengan materi yang diberikan oleh pendamping.

Modul P2K2

Modul P2K2 yang berasal dari pemerintah pusat digunakan dan diajarkan oleh para pendamping kepada penerima manfaat PKH hal ini berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis. Modul PKH yang diajarkan oleh pendamping antara lain: kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan anak, kesejahteraan sosial lansia, dan layanan untuk disabilitas berat. Namun dalam pelaksanaan penyampaian modul P2K2 di Kelurahan Sempaja Utara belum semua selesai dari 5 modul yang ada. Modul yang sudah diselesaikan pendamping dan yang ada masih berjalan yaitu dari modul satu sampai ke modul empat yang terdiri dari 12 sesi sedangkan untuk modul ke lima kesejahteraan sosial lansia dan disabilitas masih belum disampaikan kepada KPM.

Modul P2K2 merupakan modul pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan keterampilan hidup KPM PKH dengan fokus utama di bidang ekonomi, pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial serta modul lainnya yang mendukung pelaksanaan PKH. Modul P2K2 disampaikan kepada KPM dengan memperhatikan kebutuhan KPM (Pedoman PKH, 2019:45)

Faktor Penghambat Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sempaja Utara

Berdasarkan hasil penelitian, Pada tim pelaksana P2K2 PKH di Kelurahan Sempaja Utara, ditemukan faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian. Faktor penghambat yang pertama adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia yang menjadi pendamping PKH di Kota Samarinda khususnya di Kelurahan Sempaja Utara. Hal ini mengakibatkan pendamping harus memegang lebih banyak peserta KPM PKH dibandingkan dengan yang seharusnya sehingga mengakibatkan pendampingan kurang maksimal yaitu terjadinya penggabungan beberapa kelompok dalam sekali pertemuan, dan tidak semua kelompok yang telah terbentuk dapat melaksanakan pertemuan P2K2 setiap satu bulan sekali. Tidak itu saja dari ke 3 pendamping yang ada di Kelurahan Sempaja Utara 2 pendamping juga menjadi pendamping di wilayah Kelurahan Pampang dan Kelurahan Sempaja Timur hal ini membuat pendampingan *overload*. Sedangkan pendamping sosial PKH merupakan SDM terpenting dalam keberhasilan Program Keluarga Harapan. Faktor penghambat kedua adalah sarana dan prasarana yang kurang mendukung, dalam modul P2K2 tidak hanya menyampaikan materi melalui modul *flipchart* dan lainnya yang disampaikan pendamping, tetapi juga adanya materi video menonton bersama, tidak adanya pengeras suara dan proyektor serta tidak semua pendamping mempunyai laptop mengakibatkan kurang maksimal dalam pembelajaran, lalu ada wilayah yang akses jalan yang susah untuk dilewati, hujan sebentar langsung banjir dan penuh lumpur dibagian wilayah berambai dan padat karya. Faktor penghambat ketiga adalah terbatasnya dana operasional P2K2, para pendamping yang hanya menerima dana operasional sebesar Rp 125.000 per kelompok per bulan, hal ini masih kurang cukup dalam membiayai kegiatan P2K2 sehingga beberapa kali pendamping harus menggunakan uang pribadi demi lancarnya kegiatan pertemuan kelompok P2K2. Faktor penghambat keempat adalah pendataan PKH yang masih kurang baik, kurangnya koordinasi antar pihak Kelurahan dan pendamping bantuan sehingga masih adanya tidak tepat sasaran, yang mana ada beberapa warga tergolong mampu atau berkecukupan mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian di lapangan dan pembahasan mengenai pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal karena belum semua alat pembelajaran P2K2 digunakan dan tidak semua kelompok rutin dalam melakukan pertemuan P2K2 satu bulan sekali. Akan tetapi, pendamping telah menjadikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai sadar untuk berdaya mandiri dalam kehidupannya. Mereka mulai menerapkan apa yang telah mereka pelajari bersama pendamping dalam mendidik dan mengasuh anak, melindungi anak, sadar akan kesehatan dan pemenuhan gizi, mengelola keuangan dan memulai usaha. Hasil akhir dari pemberdayaan ini sudah sampai pada tahap graduasi mandiri, sudah ada KPM yang tergraduasi secara mandiri di Kelurahan Sempaja Utara.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan P2K2 penerima manfaat PKH di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda antara lain, kurangnya sumber daya manusia pendamping PKH, kurangnya dana akomodasi pertemuan yang diberikan oleh pemerintah, pendataan yang masih kurang baik dan kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam memaksimalkan pada saat pelaksanaan P2K2.

Saran

Berdasarkan penelitian, wawancara dan pembahasan yang dilakukan penulis terkait pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, maka penulis menyampaikan saran-saran yang kiranya bermanfaat bagi pihak terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Pendamping harus ditambah mengingat jumlah PKH yang terus bertambah pula dari tahun ke tahun. Hal ini juga bertujuan pendampingan PKH dapat berjalan dengan baik sehingga program PKH tersebut dapat dirasakan manfaatnya serta sesuai dengan harapan pemerintah agar terciptanya masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
2. Pemerintah Kota Samarinda dan dinas terkait yang ada dapat menaruh perhatian kepada daerah atau wilayah yang akses jalannya masih buruk dan rusak agar dapat ditindaklanjuti untuk segera diperbaiki. Karena dengan adanya akses jalan yang baik maka akan dapat memperlancar pendamping dalam kegiatan pertemuan P2K2 penerima manfaat PKH dan lainnya.
3. Demi terlaksananya kegiatan P2K2 penerima manfaat PKH dengan maksimal, maka perlunya perhatian atas sarana dan prasarana yang digunakan pendamping dalam pembelajaran P2K2 agar dapat menunjang keberhasilan kegiatan pemberdayaan KPM PKH contohnya seperti alat pengeras suara dan proyektor.

4. Anggaran dana operasional bagi kegiatan P2K2 perlu ditingkatkan, mengingat kegiatan P2K2 tidak mengenal waktu dan dilaksanakan oleh pendamping lebih dari satu kali dalam satu bulan pada kelompok dampungannya, sehingga sebaiknya adanya tambahan dana operasional untuk para pendamping dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah harus adil dengan pendamping yang ada di pulau Jawa dan pulau Kalimantan tidak bisa disamakan, karena mengingat jalanan yang ada di Kalimantan jarak antara wilayah Kelurahan lumayan jauh tidak seperti di Jawa yang berdekatan.
5. Perlunya koordinasi dan hubungan yang baik antara tim pelaksana PKH dengan pihak terkait dalam hal ini adalah Kelurahan Sempaja Utara, kemudian pihak Kelurahan dengan Ketua RT harus menjalin kerjasama yang baik karena proses verifikasi untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang meng *up to date* langsung divalidasi dari RT, maka perlunya diberikan pengarahan yang tepat dan diperlukan keprofesionalan RT agar data yang dihasilkan akurat, sesuai, tidak memihak orang dan tepat sasaran bagi masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan.

Daftar Pustaka

- Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Direktorat Jaminan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. 2019. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Kemensos RI.
- Direktorat Jaminan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. 2018. *Pedoman Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Kemensos RI.
- Direktorat Jaminan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. 2018. *Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Kemensos RI.
- Milles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, dan Jhony Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga
- Mthethwa, R. M. 2012. *Critical Dimensions for Policy Implementation*. African Journal of Public Affairs, 5(2), 36-42.
- Pasolong, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Rasyad, Ach. 2014. *Pendidikan dan Pelatihan dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Malang: Elang Mas.
- Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar T. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.